

IMPLEMENTASI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI
KABUPATEN NIAS SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA

FENOMEN NAIKRIST LAIA

30.0093

Asdaf Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara

Program Studi kebijakan Publik

Email : fenomenkristlaia97@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Drs. Herry Soesanto, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP) : In the 2020-2024 National Medium-Term Development Plan, the President issued Presidential Regulation (Perpres) Number 72 of 2021 concerning the acceleration of stunting reduction with a target of 14% in 2024. **Objectives** : This study is to determine and analyze the Implementation of Acceleration of Stunting Reduction in South Nias Regency, North Sumatra Province. **Method** : the research used is *qualitative*. Data collection techniques using observation, interview, and documentation techniques. The researcher's data analysis technique uses the implementation theory of Van Meter and Van Horn, **Results / Findings** : the research shows that the Implementation of Accelerating Stunting Reduction in South Nias Regency has not been effective due to lack of community participation with the results of interviews and direct observation in the field. **Conclusion** : the implementation of accelerated stunting reduction has been carried out well but still has not achieved the national target and there are several obstacles or obstacles such as socialization that does not run effectively due to lack of community participation. Researchers' suggestions need to make changes and evaluations in the program in the applicable local regulations and solve problems that occur in the community that become obstacles in the implementation of the program.

Keywords: *Policy Implementation, Acceleration, Stunting*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dengan target 14% di tahun 2024. **Tujuan :** penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara. **Metode :** penelitian yang digunakan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan pengambilan dokumentasi. Teknik analisis data peneliti menggunakan teori implementasi Van Meter dan Van Horn, **Hasil/Temuan :** penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Nias Selatan belum efektif dikarenakan partisipasi masyarakat yang kurang dengan hasil wawancara dan observasi langsung di lapangan. **Kesimpulan :** implementasi percepatan penurunan stunting telah dilaksanakan dengan baik namun masih belum tercapai target nasional dan ada beberapa kendala atau hambatan seperti sosialisasi yang tidak berjalan efektif karena partisipasi masyarakat yang kurang. Saran peneliti perlu adanya perubahan serta evaluasi dalam program dalam peraturan daerah yang berlaku serta menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Percepatan, Stunting

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Stunting merupakan suatu masalah nasional yang saat ini menjadi perhatian pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Stunting terjadi akibat kurangnya pemenuhan gizi pada anak dalam 1000 hari pertama kehidupan. Dengan adanya kondisi stunting pada anak, akan berakibat pada turunnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia, sehingga akan berdampak buruk pada SDM yang kurang kompeten dalam menghadapi pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.

Sesuai dengan maksud dan tujuan Presiden dalam Peraturan Perpres no 72 tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, daerah Kabupaten/Kota diberikan tugas untuk mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi pelaksanaan Program. Kabupaten Nias Selatan menjadi salah satunya 24,4 % pada tahun 2022 dengan adanya peraturan Bupati No. 19 tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Nias Selatan. Bertujuan sebagai terusan dan tindak lanjut Perpres No. 72 tahun 2021 dengan ini dilaksanakan beberapa langkah dalam mencapai target dan mengurangi angka stunting. Dengan meningkatkan kualitas mutu dan gizi serta makanan tambahan bagi ibu dan anak.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada 3 (tiga) permasalahan utama dalam implementasi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, yaitu 1) paartisipasi masyarakat yang kurang sehingga program yang dibuat tidak dapat dilaksanakan atau tidak berjalan dengan baik, 2) akses jalan menuju lokasi atau disetiap desa yang sulit dengan ini menghambat jalannya program, 3) fasilitas yang kurang dalam pelayanan baik diposyandu, klinik, dan rumah sakit.

1.3. Peneliti Terdahulu

Penelitian terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kebijakan penurunan stunting. Penelitian pertama dilakukan oleh Alrizko meidana (2022) judul penelitian Implementasi Program Upaya Pencegahan Anak Stunting Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Metode yang digunakan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif naratif. Hasil penelitian program DP2KBP3A dapat memberikan jaminan kesehatan dan kelangsungan hidup serta tumbuh kembang anak dan penurunan angka stunting

Peneliti terdahulu yang kedua, Firawati Mahmud (2022), judul penelitian Implementasi Program Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting di Desa Ulantha Kecamatan Sumawa kabupaten Bone Bolango. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti sosialisasi serta jumlah sumber daya manusia pelaksana program di puskesmas masih terbatas.

Peneliti yang ketiga, Erinia Fahzira (2021), judul penelitian implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Kampar. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adanya tim khusus untuk melaksanakan kebijakan penurunan stunting sehingga tanggungjawab pegawai kurang, masih kurangnya kesadaran masyarakat, kepemilikan tanah tidak berdomisili Kampar

Peneliti yang keempat, Ega Mutia Pradita (2022), judul penelitian implementasi program pencegahan stunting oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen pada Desa Sidoagung kecamatan Sruweng. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian program pencegahan stunting oleh Dinas Kesehatan sudah berjalan dengan baik tetap menghimbau masyarakat untuk tetap menerapkan pola makan gizi seimbang dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan

Peneliti yang kelima, Haikal Hefrizal Fatih (2022), judul penelitian Implementasi Program Kampung Keluarga Berkeluarga (KB) “Kencana Sehati” dalam Upaya Penanggulangan Stunting di Desa Sempor Lor Kecamatan

Kaligondang Kabupaten Purbalingga. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian proses koordinasi antar pelaksana program kampung KB maupun dengan instansi lain berjalan dengan baik. Namun masih ada beberapa kendala yang terjadi. Di antaranya tidak adanya SOP khusus dalam pelaksanaan program kampung KB, masih kurangnya SDM kampung KB Kencana Sehati, dan kurangnya pelatihan SDM tentang kone kampung KB.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, terdapat pada lokus dan fokus penelitian. Penulis membahas penelitian tentang implementasi Perpres no. 72 tahun 2021 program penurunan angka stunting di Kabupaten Nias Selatan. Dimana lokusnya berada di Kabupaten Nias Selatan dengan berfokus pada pelaksanaan program Perpres no. 72 tahun 2021 penurunan angka stunting. Dengan menggunakan metode kualitatif, penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program yang dilakukan oleh pemerintah dalam penurunan angka stunting di Kabupaten Nias Selatan.

1.5. Tujuan

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis program percepatan penurunan stunting, mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung serta upaya pemerintah dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara.

II. METODE

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan ini data yang nanti yang dikumpulkan berupa naskah hasil dari wawancara, dokumen pribadi, dokumen resmi dan catatan lapangan lainnya. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian berlandaskan pada filsafat *Postpositivisme*, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti berperan sebagai pengambil sumber informasi dan dilakukan secara *Purpose*, teknik pengumpulan data Triangulasi (gabungan), sehingga metode ini juga disebut sebagai metode artistik, karena proses penelitiannya lebih bersifat seni (kurang berpola) dan juga disebut sebagai metode interpretive karna data dan hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data di lapangan

Adapun peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn yang menyatakan implementasi terdiri dari 6 dimensi yaitu. 1) Standar dan Tujuan Kebijakan, 2) Sumber Daya, 3) Komunikasi Antar Organisasi, 4) Karakteristik Agen Pelaksana, 5) Sikap Para Pelaksana, 6) Lingkungan Politik, Ekonomi, dan Sosial.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis bagaimana implemmentasi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari 6 dimensi yaitu. 1) Standar dan Tujuan Kebijakan, 2) Sumber Daya, 3) Komunikasi Antar Organisasi, 4) Karakteristik Agen Pelaksana, 5) Sikap Para Pelaksana, 6) Lingkungan Politik, Ekonomi, dan Sosial.

3.1. Implementasi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti ke Dinas kesehatan, OPD terkait dan masyarakat terdapat beberapa persamaan pendapat dan perbedaan antara lain :

A. Standar dan Tujuan Kebijakan

Kebijakan dibuat untuk membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. dan menjadi perhatian bagi para pelaksana program, bahwa dikeluarkan kebijakan ini prioritas utama untuk mencapai target yang sudah ditentukan. Bukan hanya itu saja program ini berlaku bagi masyarakat Nias Selatan yang sasaran kebijakan dilaksanakan sebagai perhatian yang harus dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara, obeservasi dan dokumen yang peneliti dapatkan dilapangan disimpulkan bahwa pemahaman para stakeholder mengenai tujuan kebijakan implementasi percepatan penurunan stunting sangatlah paham, baik dari Kepala Dinas sampai stakeholder lainnya yang menjadi pelaksana program langsung dilapangan.

B. Sumber Daya

Dengan seluruh pelaksana program sudah mencukupi program tentu dapat berjalan dengan baik. Sedangkan sumber anggaran sendiri berasal dari pengalokasian dari dana desa yang diberi. Untuk program pelaksanaan program stunting 30% dana desa dari pusat yang dialokasikan. Dengan anggaran kecil itu tidak mampu membantu terlaksananya program dikarenakan ada indikator lainnya yang menjadi halangan yaitu pembangunan akses jalan sulit untuk dilewati, ini membuat proses pelaksanaan program terhambat. Berdasarkan hasil wawancara, obeservasi dan dokumen yang peneliti dapatkan dilapangan dapat diketahui sumber daya manusia dalam melaksanakan program Anggaran yang diberi dalam pelaksanaan program berasal anggaran belanja negara sebesar Rp44,8 triliun untuk mendukung Program Percepatan Pencegahan *Stunting*. Anggaran tersebut terdiri dari belanja yang tersebar di 17 Kementerian dan Lembaga sebesar Rp34,1 triliun dan Pemerintah Daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp8,9 triliun serta DAK Nonfisik sebesar Rp1,8 triliun. Dana yang dialokasikan untuk

Kabupaten Nias Selatan Rp. 3,2 miliar karena besarnya angka stunting di Nias Selatan. Dengan anggaran ini program tidak dapat dilaksanakan dengan baik dikarenakan banyak anggaran belanja yang begitu besar dan belanja lainnya.

C. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi antar pimpinan dan bawahan atau staf yang terjadi berjalan dengan baik dimana setiap kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana program harus melakukan koordinasi dan izin dengan Pimpinan atau OPD terkait karena setiap kegiatan memiliki tanggung jawab yang diemban dan berkaitan dengan pimpinan langsung, OPD terkait dan orang lain maka perlu mengikuti prosedur yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumen yang peneliti dapatkan dilapangan bahwa untuk proses komunikasi yang dilakukan dalam implementasi program percepatan penurunan stunting dilakukan dengan baik. Dinas Kesehatan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, khususnya para ketua OPD Nias Selatan untuk memimpin program percepatan penurunan stunting.

D. Karakteristik Agen Pelaksana

Konsistensi para pegawai di Dinas kesehatan dan Dinas P2KBP3A berjalan dengan baik, dimana mereka harus melakukan secara konsisten dan tepat waktu dengan berbagai sanksi bagi mereka melanggar dan sering terlambat bekerja. Aturan dibuat untuk menambah motivasi para pegawai dalam bekerja. Program yang dijalankan berjalan dengan baik dengan konsistensi para pegawai yang bekerja. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumen yang peneliti dapatkan dilapangan dapat diketahui bahwa peran seorang pelaksana program dan karakteristik agen pelaksana menjadi tumpuan terlaksananya program dan tujuan kebijakan dapat tercapai baik nasional maupun daerah.

E. Sikap Para Pelaksana

Sikap para pelaksana program dan kedisiplinan pegawai dalam bekerja begitu baik. Respon dan tanggapan mereka bagus karena memiliki tugas dan tanggung jawab masing masing, sikap dan respon menentukan kesuksesan program yang dilaksanakan. Komunikasi antar atasan dengan staf berjalan dengan baik. Koordinasi dan komunikasi antar pegawai berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumen yang peneliti dapatkan dilapangan tersebut terlihat jelas bahwa sikap pelaksana program dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting dilaksanakan dengan baik, disertai koordinasi dan komunikasi antar atasan dan pegawai/staf berjalan dengan baik, komunikasi dan koordinasi antar pegawai berjalan dengan baik.

F. Lingkungan Politik, Ekonomi, dan Sosial

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumen yang peneliti dapatkan dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh politik, sosial dan ekonomi terhadap masyarakat. Dalam hal politik terhadap masyarakat berjalan dengan baik dimana hubungan masyarakat dan pemerintah berjalan dengan baik dimana pemerintah menjadi sarana penyampaian pendapat, saran, dan kritik dari masyarakat kepada pemerintah pusat. Sedangkan pengaruh ekonomi terhadap masyarakat menjadi masalah utama dikarenakan masyarakat memiliki mindset yang bisa dibilang tidak maju sehingga program dari pemerintah tidak berjalan dengan baik.

3.2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung dalam Implementasi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Nias Selatan

A. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumen yang peneliti dapatkan dilapangan dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung yang dilaksanakan adalah adanya program yang berkaitan dengan OPD terkait yang mempunyai tugas dan fungsi masing masing, contoh Dinas Kesehatan sebagai pelaksana langsung dalam mengecek kondisi anak dan resep bagi orang tua dalam mencegah anak stunting. Dan peran Dinas P2KBP3A adalah mengaudit beberapa daerah sebagai sampel untuk bahan evaluasi dalam pencegahan stunting dan sudah dilakukan 2 kali setiap 3 bulannya. Peran Dinas Perikanan dan Dinas Pertanian membantu dalam pemberian makanan tambahan bagi anak untuk mencukupi gizi pada anak. Program yang dilaksanakan dengan ada sarana dan prasarana dari desa yaitu posyandu dan dan desa yang dialokasikan untuk program percepatan penurunan stunting.

B. Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumen yang peneliti dapatkan dilapangan dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat program percepatan penurunan stunting berasal dari masyarakat sendiri yang tidak menginginkan program yang dijalankan oleh pemerintah. Bukan hanya faktor kualitas masyarakat yang rendah dan perekonomian masyarakat yang masih bergantung dengan bantuan pemerintah. Dan secara garis banyaknya pengangguran juga mempengaruhi pelaksanaan program dan sedikitnya lapangan pekerjaan yang dibuka. Setelah mengetahui apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang terdapat di daerah Nias Selatan, maka hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor hambatan ini dapat merusak faktor pendukung karena program yang dijalankan ditujukan langsung kepada masyarakat namun faktor hambatan terdapat langsung dari masyarakatnya. Faktor ini menentukan betapa tidak berfungsinya program dijalankan juga masyarakat tidak memiliki kesadaran sendiri untuk menjaga masa depan anak yang mungkin berpengaruh dalam perkembangan dan pendidikan sang anak.

3.3. Upaya Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam mengatasi Faktor Penghambat Implementasi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan dalam meningkatkan Implementasi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Nias Selatan, yaitu:

1. Memaksimalkan kesesuaian data pertumbuhan anak melalui peningkatan kinerja Puskesmas di Desa Lokus agar data perkembangan *stunting* menjadi valid.
2. Terus melakukan Audit di seluruh daerah di Nias Selatan untuk mengetahui dan evaluasi program yang telah dijalankan.
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat paham tentang pentingnya usaha penurunan *stunting*.
4. Mengadakan program Calon Pengantin Cegah *Stunting*, program ini merupakan program yang bersifat preventif yang dilakukan dengan bekerjasama bersama dengan Dinas Sosial untuk mengedukasi para calon pengantin tentang pentingnya pemenuhan gizi pada saat kehamilan dan anak agar generasi kedepannya tercegah dari *stunting*

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam pelaksanaan program ini terdapat permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan politik, ekonomi dan sosial pada masyarakat dalam hambatan implementasi percepatan penurunan stunting ini adalah masih kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan ini. Hal ini didukung dengan sumber sumber daya yang tersedia yang terbatas dan akses jalan menuju lokasi daerah stunting. Serta pelayanan fasilitas yang kurang terutam posyandu disetiap desa sehingga pelayanan tidak dapat terlaksana secara optimal.

Dengan adanya fasilitas yang lengkap seperti alat medis dan akses jalan yang mendukung pelaksanaan program dapat dilaksanakan secara optimal. Serta adanya peningkatan edukasi kepada masyarakat terhadap stunting.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan sebelumnya implementasi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Nias Selatan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Standar dan Tujuan kebijakan, bahwa pemahaman para stakeholder mengenai tujuan kebijakan implementasi percepatan penurunan stunting sangatlah paham, baik dari Kepala Dinas sampai stakeholder lainnya yang menjadi pelaksana program langsung dilapangan.

2. Sumber Daya, anggaran yang cukup dan seluruh SDM yang bekerja dengan baik dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing masing.
3. Komunikasi Antar Organisasi, proses komunikasi yang dilakukan dalam implementasi program percepatan penurunan stunting dilakukan dengan baik. Dinas Kesehatan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, khususnya para ketua OPD Nias Selatan untuk memimpin program percepatan penurunan stunting.
4. Karakteristik Antar pelaksana, peran seorang pelaksana program dan karakteristik agen pelaksana menjadi tumpuan terlaksananya program dan tujuan kebijakan dapat tercapai baik nasional maupun daerah
5. Sikap Para Pelaksana, sikap pelaksana program dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting dilaksanakan dengan baik, disertai koordinasi dan komunikasi antar atasan dan pegawai/staf berjalan dengan baik, komunikasi dan koordinasi antar pegawai berjalan dengan baik.
6. Lingkungan Politik, Ekonomi, dan Sosial. pengaruh politik, sosial dan ekonomi terhadap masyarakat. Dalam hal politik terhadap masyarakat berjalan dengan baik dimana hubungan masyarakat dan pemerintah berjalan dengan baik dimana pemerintah menjadi sarana penyampaian pendapat, saran, dan kritik dari masyarakat kepada pemerintah pusat. Sedangkan pengaruh ekonomi terhadap masyarakat menjadi masalah utama dikarenakan masyarakat memiliki mindset yang bisa dibilang tidak maju sehingga program dari pemerintah tidak berjalan dengan baik.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih terbatasnya hasil dan temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan implementasi kebijakan tentang penurunan stunting untuk menemukan hasil yang lebih dalam

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Dinas Kesehatan, OPD terkait serta pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang telah memberikan waktu dan tempat untuk kesempatan bagi peneliti melakukan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Van Meter dan Van Horn (1975). *The Policy Implementation Process A Conceptual Framework*.

B. Tesis

Meidana, A. (2022). *Implementasi Program Upaya Pencegahan Children Stunting Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dp2kbp3a) Di Kec. Pelaihari Kab. Tanah LauT*. Columbus USA: Sage

C. Skripsi

Fahzira, E. (2021). *Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Kabupaten Kampar*.

Fahzira, E. (2021). *Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Kabupaten Kampar*.

Fatih, H. H. (2022). *Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) "Kencana Sehati" Dalam Upaya Penanggulangan Stunting Di Desa Sempor Lor Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga*.

Mahmud, F. (2022). *Implementasi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Bone Bolango (Studi Kasus di Desa Ulantha Kecamatan Sumawa*.

Pradita, E. M. (2022). *Implementasi Program Pencegahan Stunting Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Pada Desa Sidoagung Kecamatan Sruweng*.

D. Perundang undangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

Peraturan Bupati No.19 tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Di Daerah